



Terbentuknya Provinsi Banten: Dinamika Pemerintahan, Munculnya Dinasti Politik, dan Hegemoni Kekuasaan dari Era Reformasi hingga Kontemporer

INFO PENULIS

Agus Rustamana
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
agus.rustamana@untirta.ac.id

Akmal Trisnadi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
kemaltesers@gmail.com

Andini Siffa Agnia
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
andin72882@gmail.com

Najwa Ayu Fadhila
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
nnajwaayu248@gmail.com

Novia Nazwa
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
nazwanazwaaaa123@gmail.com

Olinina Chyka Ramadhani
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
olininacchyka08@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rustamana, A., Trisnadi, A., Agnia, A. S., Fadhila, N. A., Nazwa, N., & Ramadhani, O. C. (2025). Terbentuknya Provinsi Banten: Dinamika Pemerintahan, Munculnya Dinasti Politik, dan Hegemoni Kekuasaan dari Era Reformasi hingga Kontemporer, 5 (3), 4731-4736.

Abstrak

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia yang terbentuk pasca runtuhnya rezim Orde Baru sebagai bagian dari dinamika reformasi dan desentralisasi pemerintahan. Provinsi ini resmi berdiri pada 4 Oktober 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 setelah memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi Banten dilatarbelakangi oleh aspirasi masyarakat untuk memperoleh kemandirian dalam pengelolaan potensi dan sumber daya lokal yang berakar pada faktor sejarah, budaya, dan identitas kedaerahan. Krisis ekonomi tahun 1997–1998 turut membuka ruang bagi menguatnya tuntutan otonomi daerah serta mendorong keterlibatan aktif generasi muda dan mahasiswa Banten dalam perjuangan pembentukan provinsi. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-analitik melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, dan sumber daring yang relevan. Data dianalisis secara kronologis dan tematik untuk memahami dinamika historis serta implikasi pembentukan Provinsi Banten terhadap praktik pemerintahan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasca pemekaran, dinamika kekuasaan lokal di Banten diwarnai oleh menguatnya dinasti politik dan hegemoni kekuasaan, yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu,

penguatan prinsip good governance menjadi penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata Kunci: Provinsi Banten, Reformasi 1998, Krisis Ekonomi 1997, Dinasti Politik, Good Governance.

Abstract

Banten Province is one of Indonesia's newly established provinces formed in the aftermath of the collapse of the New Order regime as part of the broader dynamics of reform and governmental decentralization. The province was officially established on October 4, 2000, through Law Number 23 of 2000, following its separation from West Java Province. The formation of Banten Province was driven by public aspirations for greater autonomy in managing local potential and resources, which were deeply rooted in historical, cultural, and regional identity factors. The economic crisis of 1997–1998 further opened political space for strengthening demands for regional autonomy and encouraged the active involvement of Banten's younger generation and student movements in the struggle for provincial formation. This study employs a library research method with a descriptive-analytical approach, drawing on scholarly journals, books, official documents, and relevant online sources. The collected data are analyzed chronologically and thematically to examine the historical dynamics and the implications of Banten's formation for local governance practices. The findings indicate that following regional expansion, local power dynamics in Banten have been characterized by the emergence of political dynasties and hegemonic power structures, which pose challenges to the quality of democracy. Therefore, strengthening the principles of good governance is essential to promote transparent, accountable, and participatory local governance. **Keywords:** Mathematics Learning Outcomes, Scramble Type Cooperative Learning Model with Contextual Teaching and Learning (CTL) approach.

Key Words: Banten Province, Reformasi 1998, 1997 Economic Crisis, Political Dynasty, Good Governance.

A. Pendahuluan

Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi yang terbentuk setelah runtuhnya rezim orde baru. Provinsi Banten terbentuk pada 4 Oktober 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, setelah melepaskan diri dari Provinsi Jawa Barat sebagai daerah otonom. Aspirasi Masyarakat untuk memperoleh kemandirian dalam pengelolaan potensi dan sumber daya lokal merupakan faktor utama terbentuknya Provinsi Banten. Keinginan tersebut juga tidak terlepas dari Sejarah dan budaya Banten yang kuat dan menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat.

Namun, seiring dengan terbentuknya Provinsi Banten, sistem pemerintahan daerah memunculkan dinamika baru. Otonomi daerah yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan dengan baik. Beberapa oknum di pemerintahan justru mendominasi struktur kekuasaan. Dalam perjalanannya, pola kepemimpinan di Provinsi Banten mulai menunjukkan kecenderungan terpusat pada figur tertentu yang dianggap dominan dalam banyak aspek seperti memiliki jejaring kuat, baik secara politik maupun kekerabatan. Fakta tersebut yang menjadi cikal bakal tumbuhnya dinasti politik, di mana kekuasaan tidak hanya diwariskan secara demokratis, tapi juga dipertahankan melalui ikatan keluarga maupun hubungan timbal balik politik.

Salah satu aspek mencolok dalam perjalanan politik Banten adalah munculnya fenomena kekuasaan dinasti, khususnya sejak masa kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Dinasti ini mengakar kuat dalam berbagai lini pemerintahan daerah, bahkan hingga ke tingkat kabupaten/kota. Fenomena ini memunculkan diskursus mengenai praktik demokrasi, transparansi pemerintahan, dan distribusi kekuasaan yang adil. Dinasti politik yang berkembang di Banten menjadi salah satu studi kasus penting dalam memahami bagaimana kekuasaan dapat dikonsolidasikan dalam lingkaran sempit elite lokal. (Fathan Syuro Al Alim, & Nunik Retno Herawati., 2024)

Seiring dengan berjalannya waktu dan menginjak era modern, penerapan hegemoni politik di Banten tetap menarik perhatian. Walaupun sudah ada reformasi dan pemindahan kekuasaan, beberapa praktik politik yang lama tetap ada dengan tampilan yang berbeda. Ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa efektif demokrasi di tingkat lokal dan bagaimana peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta melibatkan partisipasi. Dengan

tulisan ini, penulis berusaha mengajak pembaca melihat lebih dekat perjalanan terbentuknya Provinsi Banten, bukan sekadar soal pemekaran wilayah, tapi juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertahankan dari masa ke masa. Dari awal berdirinya hingga kini, Banten menyimpan banyak cerita tentang dinamika pemerintahan, munculnya dinasti politik, dan kuatnya pengaruh segelintir elite dalam mengendalikan arah politik daerah. Lewat kajian ini, penulis ingin memahami bagaimana semua itu bisa terjadi, apa dampaknya bagi masyarakat, dan apa yang bisa kita pelajari untuk membangun pemerintahan yang lebih adil, terbuka, dan benar-benar demokratis.

B. Metodologi

Artikel ini ditulis oleh penulis dengan menggunakan penelitian perpustakaan, suatu metode penelitian yang difokuskan pada analisis dan tinjauan sumber-sumber literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yakni sebuah pendekatan penelitian yang berupaya untuk menjelaskan, menguraikan, dan menampilkan fakta yang ditemukan, menganalisis permasalahan yang ada, serta mengidentifikasi hubungan di antara fakta-fakta tersebut.

Penulis memanfaatkan data jurnal, sumber tulisan, serta artikel yang terdapat di media sosial dan internet untuk mengumpulkan data dan mencari dokumen terkait dengan topik tulisan ini. Metode ini menggambarkan objek tulisan berdasarkan fakta yang akurat, memahami peristiwa secara kronologis, serta menjelaskan informasi yang diperoleh sebagai materi analitis sesuai dengan topik yang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

Selama krisis ekonomi tahun 1997, bersamaan dengan masalah-masalah yang melanda seluruh kawasan Asia Timur, dunia mengalami gejolak yang luar biasa. Krisis ini akhirnya menyebabkan runtuhnya rezim Suharto. Selama era reformasi, keinginan rakyat Banten untuk merdeka muncul, dan mereka menuntut agar wilayah mereka dijadikan provinsi di era desentralisasi. Menurut (Alvina Alya Rahma dkk., 2022), upaya pembentukan Provinsi Banten didorong langsung oleh antusiasme generasi muda Banten di seluruh nusantara, terutama mahasiswa Banten yang belajar di kota-kota lain, agar tidak ketinggalan dalam perjuangan pembentukan Provinsi Banten. Proses pembentukan Provinsi Banten penuh dengan kompleksitas politik dan melibatkan banyak konflik politik, yang terjadi selama perselisihan antara elit Banten dan elit Jawa Barat. Kelompok elit yang terlibat dalam pembentukan Provinsi Banten terbagi menjadi dua kelompok utama: Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja PPB) dan Komite Pembentukan Provinsi Banten (Komite PPB). Setelah Banten ditetapkan sebagai provinsi, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan impian rakyat akan kemakmuran dan kemajuan. (Radjimo Sastro Wijono., 2017)

Dinasti politik di Indonesia telah ada sejak era Orde Baru, di mana terdapat hegemoni pemerintah dan partai politik yang kuat dalam mengatur sistem politik di Indonesia pada masa itu. Hal ini membuat lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap negara dan pemerintah hampir tidak mampu melaksanakan tugasnya. Hegemoni merupakan kemenangan kelas penguasa yang diraih melalui mekanisme konsensus dari berbagai kekuatan sosio-politik (Endah Siswati, 2017). Dinasti politik terbentuk akibat jaringan kekuasaan yang menyebar dan menguat di suatu daerah. Ketika jaringan ini mendukung kekuasaan dinasti politik, maka akan muncul kekuasaan yang bersifat absolut. Apabila kekuasaan menjadi absolut, penyalahgunaan kekuasaan akan semakin meluas. Situasi ini mengarah pada penguatan jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik yang berdasarkan kedekatan politik keluarga, yang menyebabkan tertutupnya kesempatan bagi individu di luar dinasti. (Robinson Sembiring & Muba Simanihuruk., 2018) (Yaya Mulyana, 2001)

Kehadiran kekuasaan dinasti menciptakan tantangan dalam kepemimpinan tingkat lokal, khususnya dalam kerangka otonomi lokal dan proses demokrasi, di mana partisipasi masyarakat menjadi rendah karena dikuasai kelompok elit atau aktor politik dinasti (Adelia Fitri, 2019). Dinasti politik dinilai sebagai usaha kelompok tertentu untuk mengendalikan pemerintahan, yang berisiko memicu praktik korupsi dalam pengelolaan pemerintahan serta sumber daya alam di daerah tersebut (Alvina Alya Rahma dkk., 2022). Praktik dinasti politik sebelumnya sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berbagai peneliti telah melakukan studi mengenai politik dinasti ini dengan beragam tema dan hasil yang diperoleh. Keterpilihan para individu, baik dalam jalur pemilihan

kepala daerah maupun legislatif, dapat dipengaruhi oleh keberadaan tokoh politik di dalam partai dan faktor-faktor yang terkait dengan kepala daerah.(Fitriah, 2020)

Sukses kekuasaan yang berlangsung melalui cara familisme yang terjadi akibat kebetulan dan juga perencanaan dapat ditemukan di banyak kabupaten serta kota. Pada kondisi yang direncanakan, biasanya istri mengambil alih posisi suami atau seorang anak menggantikan ayahnya. Di sisi lain, dalam keadaan kebetulan, kerabat dijadikan calon pemimpin daerah yang hanya berfungsi sebagai pengganti kerabat lain yang lebih diunggulkan. Dinasti di Banten hadir dalam berbagai aspek seperti sosial budaya, ekonomi, agama, dan juga politik. Aspek politik dinasti Banten dimulai dengan Chasan Sochib; ia pada awalnya adalah seorang entrepreneur yang sukses sebelum terlibat dengan partai Golkar. Chasan Sochib kemudian berhasil menempatkan banyak anggota keluarganya dalam struktur partai Golkar Provinsi Banten, yang menjadi alat untuk melanjutkan kekuasaan dinasti.(Winda Roselina Effendi., 2018)

Jejak dari budaya politik yang mengedepankan familisme dalam dinasti politik Banten dapat dianalisis dengan penelusuran sumber-sumber kekuasaan yang ada. Kasus-kasus politik di Banten menjadi bukti nyata bahwa politik dinasti telah dirancang oleh para kerabat untuk terlibat dalam dunia politik. Temuan dari penelitian mengungkapkan bahwa praktik politik dinasti di Banten telah dimulai sejak tahun 2006, yang dipicu oleh Ratu Atut Chosiyah setelah ia meningkatkan posisinya dari Wakil Gubernur menjadi Pelaksana Tugas Gubernur pada tahun 2005, mengambil alih posisi Djoko Munandar yang diberhentikan akibat skandal korupsi dana perumahan anggota DPRD Banten. Sejak menjabat sebagai pemimpin di Banten, anggota keluarga Ratu Atut satu per satu mulai memasuki dunia politik praktis, baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif di berbagai tingkat perwakilan.

Jejak dari budaya politik yang mengedepankan familisme dalam dinasti politik Banten dapat dianalisis dengan penelusuran sumber-sumber kekuasaan yang ada. Kasus-kasus politik di Banten menjadi bukti nyata bahwa politik dinasti telah dirancang oleh para kerabat untuk terlibat dalam dunia politik. Temuan dari penelitian mengungkapkan bahwa praktik politik dinasti di Banten telah dimulai sejak tahun 2006, yang dipicu oleh Ratu Atut Chosiyah setelah ia meningkatkan posisinya dari Wakil Gubernur menjadi Pelaksana Tugas Gubernur pada tahun 2005, mengambil alih posisi Djoko Munandar yang diberhentikan akibat skandal korupsi dana perumahan anggota DPRD Banten. Sejak menjabat sebagai pemimpin di Banten, anggota keluarga Ratu Atut satu per satu mulai memasuki dunia politik praktis, baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif di berbagai tingkat perwakilan.(Agus Sutisna., 2017)

Pada Tahun 2013, Ratu Atut dan adiknya yaitu Tubagus Chairil Wardana ditangkap oleh KPK atas kasus suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar, mereka ditangkap karena perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan juga korupsi pengadaan sarana-prasarana alat-alat kesehatan dan pengadaan barang lainnya di Provinsi Banten dari tahun 2011 sampai 2013. Dengan ditangkapnya Ratu Atut dan Chairil Wardana, banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini adalah akhir dari politik dinasti keluarga ini di Banten. Namun, dengan dipenjaranya Ratu Atut dan Chairil Wardana ternyata tidak berpengaruh pada kemenangan keluarganya di Pilkada serentak Banten Tahun 2015.

Table 1 Tabulasi Dinasti Politik di Banten

No	Nama/Name	Jabatan/Position	Hubungan/Relation
1	Ratu Atut	Gubernur	
2	Haerul Jaman	Walikota Serang	Adik
3	Heryani	Wakil Bupati Pandeglang	Ibu Tiri
4	Airin Rachmi Diany	Walikota Tangerang Selatan	Ipar
5	Hikmat Tomet	DPR RI (Golkar)	Suami
6	Andika Hazrumy	DPD	Anak
7	AddeRosi Khoerunnisa	Wakil Ketua DPRD II Kota Serang (Golkar)	Menantu
8	Andiara Aprilia Hikmat	DPD	Anak
9	Tanto Warbono Arban	DPRD I Banten	Menantu

Sumber (source): Lima, 2014

berformat Dinasti Octopussy, yaitu sebuah sistem politik yang didasarkan pada jaringan kekuasaan yang mirip dengan bentuk gurita karena luasnya jaringannya (Mhd. Al Fahjri Sukri, 2020). Sistem politik ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi serta menurunkan

daya saing dalam pemilu (Martien Herna Susanti, 2017). Fenomena politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah semakin meningkat seiring berjalannya waktu sejak dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia pada tahun 2005. Kekuatan pemerintah pusat di tingkat lokal mengalami pelemahan akibat adanya kontrol dari klan-klan politik yang beroperasi di sektor eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam hal ini, jaringan keluarga juga telah mengendalikan berbagai proyek pembangunan di daerah yang diberikan kepada para kroninya.

Politik dinasti dapat muncul salah satunya akibat rendahnya keterlibatan publik, sebab melalui pemilihan langsung, masyarakat seharusnya bisa menentukan pilihan mereka sendiri. Dalam konteks Banten, partisipasi politik warga tampak sangat minim dan tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh KPU, yang menginginkan angka partisipasi di atas 70 persen, terutama setelah Pilkada 2015. Keterlibatan masyarakat yang begitu rendah di Banten saat Pilkada dapat dikatakan berkontribusi terhadap keberlangsungan dan berkembangnya dinasti politik.

Menanggapi fenomena tersebut, sangat penting bagi masyarakat untuk memperbesar kesadaran politik serta partisipasi langsung dalam pemilu, karena hal ini adalah salah satu elemen penting bagi adanya perubahan dalam pemerintahan. Apabila para pelaku politik dalam dinasti ini tidak dianggap membawa kemajuan atau perubahan selama masa jabatan mereka, maka publik memiliki hak untuk tidak memberikan suara kepada mereka lagi. Dengan cara ini, partisipasi publik sangat vital dan menjadi kebutuhan untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

D. Kesimpulan

Artikel ini telah menunjukkan bahwa penciptaan provinsi Banten diakibatkan oleh aspirasi masyarakat Banten untuk memiliki otonomi pemerintahan mandiri dan berusaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat. Proses pembentukan provinsi Banten merupakan perjalanan politik yang rumit disertai dengan banyak konflik politik. Pada tahun 2000, Banten akhirnya secara resmi diakui sebagai sebuah provinsi.

Berdasarkan berbagai temuan dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanda-tanda awal kebangkitan dinasti politik Banten dimulai sejak wilayah ini dibentuk dan memutuskan untuk berpisah dari Jawa Barat pada 4 Oktober 2000. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur antara 2001 hingga 2006, Chasan Sohib berhasil mengukuhkan dinasti politiknya dengan melantik putrinya, Ratu Atut, sebagai Wakil Gubernur dalam Pilgub 2006. Ratu Atut sukses menempatkan keluarga dan kerabatnya di berbagai posisi politik, baik eksekutif maupun legislatif, serta menyebarkan pengaruhnya ke asosiasi bisnis, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dan berbagai entitas lainnya di Banten.

Dinasti politik terbentuk oleh adanya jaringan kekuasaan yang kuat dan tersebar di suatu daerah. Ketika jaringan tersebut mendukung kemunculan dinasti politik, hal ini dapat menciptakan kekuasaan yang absolut. Syarat untuk bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik yang diatur dalam regulasi pemilihan kepala daerah maupun ketentuan internal partai politik tidak menghalangi perkembangan politik dinasti dalam proses pencalonan. Faktor penting lainnya dalam pemilihan calon adalah kekuatan finansial, popularitas, dan elektabilitas dari seorang kandidat. Pasangan calon yang berasal dari latar belakang dinasti biasanya memiliki keuntungan dari nama keluarga yang berdampak pada hasil survei. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa mereka perlu memiliki kesadaran politik yang tinggi.

E. Referensi

- Al Alim, F. S., & Herawati, N. R. (2025). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DINASTI POLITIK DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 350-367.
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233-247.
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 91-111.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1-17.
- Mulyana, Y. (2001). Dimensi Gerakan dalam Proses Pembentukan Propinsi Banten. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1), 61-90

- Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2260-2269.
- Sembiring, R., & Simanihuruk, M. (2018, October). Politik Dinasti dan Desentralisasi. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1(1), 092-098
- Sutisna, A. (2017). Gejala proliferasi dinasti politik di Banten era kepemimpinan gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100-120.
- Siswati, E. (2017). Anatomi teori hegemoni antonio gramsci. *Jurnal Translitera*, 5(1), 11-33.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti politik dalam pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119.
- Sukri, M. A. (2020). Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 169-190.
- Wijono, R. S. (2007). *Di Bawah Bayang-bayang Ibukota: Penataan Daerah di Provinsi Banten dari Jaman Kolonial sampai Jaman Reformasi*. Pustaka Lembaga Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik).